



Komisi Nasional  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

# Menelisis Indonesia dengan Indeks dan Indikator

Stanley Adi Prasetyo

Jakarta, 9 Agustus 2011



Map Trek  
Southeast Asia: Earth At Night



22

# Indonesia di Waktu Malam

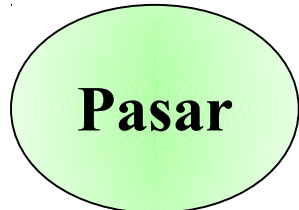
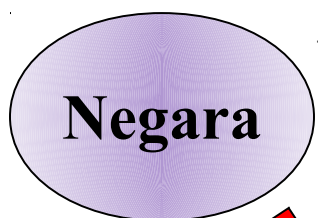


# Persoalan Pemenuhan HAM Indonesia Kini

- Korupsi/KKN
- Pelanggaran HAM (Sipol dan Ekosob), impunitas
- Diskriminasi

- Investasi tak transparan
- Illegal fishing, illegal logging
- Eksploitasi lingkungan secara buas
- Penambangan pasir liar
- Transnational Crimes
- Jebakan Utang
- Penjualan pulau

- Globalisasi
- Neo-liberalisasi
- Hak cipta/ intelektual



- Politik kelompok/golongan
- Kolusi bisnis elit dgn birokrasi
- Munculnya kelompok kekerasan

- Human Trafficking
- Monopoli, oligopoli
- Penjajahan terselubung

- Komunalisme
- Konflik sosial
- Konflik SARA
- Kesenjangan (4 hal)



INDICATORS OF INSTABILITY

RANK	TOTAL	COUNTRY	DEMOGRAPHIC PRESSURES	REFUGEES AND DISPLACED PERSONS	GROUP GRIEVANCE	HUMAN FLIGHT	UNEVEN DEVELOPMENT	ECONOMY	DELEGITIMIZATION OF STATE	PUBLIC SERVICES	HUMAN RIGHTS	SECURITY APPARATUS	FRAGMENTALIZED ELITES	EXTERNAL INTERVENTION
60	83.3	Indonesia	7.0	7.3	5.9	7.5	8.0	6.3	6.8	6.7	6.8	7.1	7.0	6.9
2	113.0	Sudan	9.0	9.6	8.8	8.8	9.3	7.3	10.0	9.5	9.9	9.8	9.9	9.9
3	112.5	Zimbabwe	9.7	9.0	10.0	10.0	9.6	10.0	9.5	9.6	9.8	9.5	9.3	7.0
4	110.9	Chad	9.1	9.2	9.7	7.8	9.1	8.3	9.7	9.4	9.5	9.8	9.8	9.5
5	110.6	Iraq	9.0	9.0	9.8	9.3	8.5	7.8	9.4	8.5	9.6	9.8	9.8	10.0
6	106.7	Dem. Rep. of the Congo	9.6	9.2	8.8	7.9	9.0	8.3	8.3	9.1	8.9	9.6	8.6	9.4
7	105.4	Afghanistan	9.1	8.9	9.5	7.0	8.1	8.5	9.2	8.3	8.4	9.6	8.8	10.0
8	104.6	Ivory Coast	8.5	8.3	9.5	8.4	8.0	8.5	8.9	7.8	9.0	9.2	8.9	9.7
9	103.8	Pakistan	8.0	8.6	9.5	8.1	8.8	6.2	9.5	7.1	9.5	9.6	9.8	9.1
10	103.7	Central African Republic	9.0	8.8	8.9	5.5	8.8	8.4	9.2	8.6	8.7	9.4	9.4	9.0
11	101.8	Guinea	7.9	7.4	8.5	8.3	8.6	8.6	9.7	9.0	8.9	8.4	8.6	7.9
12	100.3	Bangladesh	9.8	7.1	9.7	8.4	9.0	7.1	9.1	7.8	8.0	8.3	9.6	6.4
12	100.3	Burma	8.5	8.5	9.5	6.0	9.0	7.6	9.5	8.3	9.9	9.3	8.7	5.5
14	99.3	Haiti	8.5	4.2	8.0	8.0	8.2	8.3	9.0	8.8	8.9	8.9	8.9	9.6
15	97.7	North Korea	8.2	6.0	7.2	5.0	8.8	9.6	9.8	9.6	9.7	8.3	7.6	7.9
16	96.1	Ethiopia	8.9	7.5	7.8	7.5	8.6	8.2	7.9	7.5	8.5	7.5	8.9	7.3
16	96.1	Uganda	8.7	9.3	8.3	6.0	8.5	7.6	8.3	7.9	7.9	8.1	7.8	7.7
18	95.7	Lebanon	7.2	9.0	9.4	7.1	7.4	6.3	8.0	6.7	7.0	9.3	9.4	8.9
18	95.7	Nigeria	8.2	5.1	9.4	8.2	9.2	5.9	8.9	8.7	7.5	9.2	9.3	6.1
20	95.6	Sri Lanka	7.0	9.0	9.8	6.9	8.2	6.0	9.2	6.6	7.5	9.3	9.5	6.1
21	95.4	Yemen	8.6	7.2	7.3	7.2	8.8	8.2	8.0	8.3	8.0	8.2	8.9	7.2
22	94.5	Niger	9.5	6.0	9.2	6.0	7.2	9.2	8.4	9.1	7.9	7.5	6.7	7.8
23	94.2	Nepal	8.1	5.5	9.0	6.1	9.2	8.2	8.3	7.0	8.8	8.5	8.3	7.2
24	94.1	Burundi	9.1	8.2	6.7	6.5	8.8	8.0	7.1	9.0	7.5	6.8	7.8	8.6
25	93.8	East Timor	8.1	8.6	7.1	5.3	6.5	8.2	9.0	8.0	6.9	8.8	8.5	8.8
26	93.4	Republic of the Congo	8.7	7.7	6.8	6.1	8.1	8.0	8.8	8.8	7.9	7.9	7.2	7.4
26	93.4	Kenya	8.7	8.5	7.6	8.0	8.1	6.9	8.2	7.4	7.2	7.1	8.4	7.3
26	93.4	Uzbekistan	7.7	5.4	7.1	7.1	8.6	7.7	9.3	6.8	9.2	9.0	9.2	6.3
29	92.9	Malawi	9.0	6.2	6.0	8.2	8.8	9.1	8.0	9.0	7.8	5.4	7.6	7.8
30	92.4	Solomon Islands	8.7	4.8	8.0	5.1	8.0	8.0	8.7	8.5	7.1	7.7	8.8	9.0
31	92.3	Sierra Leone	8.6	7.4	6.9	8.4	8.2	8.7	7.7	8.2	7.0	6.4	7.5	7.3



# Model Indikator

HDI/IPM

Indeks Negara Gagal

Indeks Korupsi

Indeks Kebebasan Pers

Indeks Masyarakat Sipil

Indikator/Indeks Hak Asasi Manusia

Indeks Demokrasi

DII

**Masing-masing indikator sebetulnya saling berkaitan**



# Indikator Demokrasi

Mencoba memotret demokrasi di 33 propinsi di Indonesia

Alat yang digunakan adalah 28 indikator

Sumber data adalah pemberitaan media massa, dokumen terbitan pemerintah, FGD, dan indepth interview

Skoring oleh panel ahli



# Kelemahan

Penggunaan dokumen tunggal (sumber pemerintah)

Absennya data lembaga negara dan institusi pemerintah yang independen (Komnas HAM, KPK, Ombudsman, Komnas Perempuan, Kompolnas, KY, Komisi Kejaksaan, Bawaslu, Dewan Pers, Komisi Informasi, dll) yang jadi tempat pengaduan masyarakat

Absennya penilaian dari NGO yang bergerak di advokasi kebebasan sipil-politik (Elsam, ICW, Dian Interfidei, ICRP, Maarif Institut, Setara Institut, Wahid Institut, Arus Pelangi, UPC, PBHI, LBH Pers, dll)

Hanya menggunakan pendekatan “hak” dan tidak melihat kewajiban negara sebagaimana tercantum dalam “general comment” DUHAM

Tidak semua “hak” digunakan sebagai indikator



# Hak Sipil-Politik Dalam DUHAM

## Hak Sipil

*“Biarkan saya menjadi diri saya sendiri”*

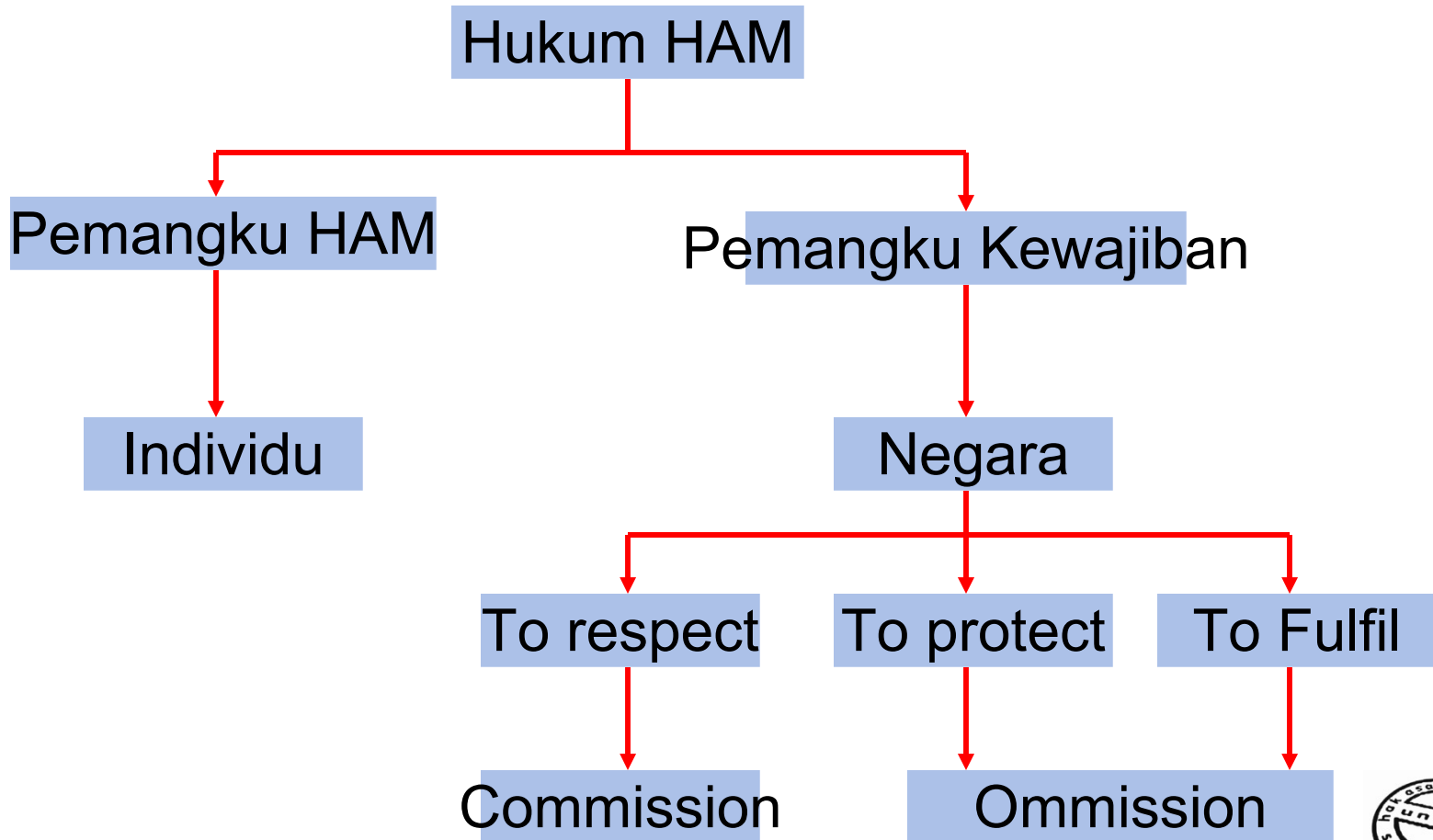
1. Hak atas persamaan (tiap orang terlahir merdeka dan memiliki persamaan martabat dan hak)
2. Hak atas kebebasan dari diskriminasi dan perbedaan perlakuan dalam bentuk apapun
3. Hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu
4. Hak untuk bebas dari perbudakan dan perhambaan
5. Hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan, dan penghukuman secara keji yang merendahkan martabat kemanusiaan
6. Hak diakui sebagai manusia pribadi di depan hukum
7. Hak atas persamaan di dpn hukum
8. Hak atas pemulihan hak yang efektif oleh pengadilan yang kompeten
9. Kebebasan dari penangkapan, penahanan, atas pengasingan sewenang-wenang
10. Hak atas pemeriksaan yang adil dan berkeadilan yang terbuka oleh pengadilan yg independen serta tak memihak
11. Hak atas praduka tak bersalah sampai terbukti bersalah

## Hak Politik *“Biarkan kami turut berpartisipasi”*

18. Hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan beragama atau kepercayaan
19. Hak utk bebas menyatakan pendapat, informasi, dan ekspresi
20. Hak berkumpul dan berserikat secara damai
21. Hak berpartspns dalam pem. dan pemilu serta hak atas pelayanan umum



# Kewajiban Negara



DIMENSI-DIMENSI HAK ASASI MANUSIA

Obligasi Negara Hak-Hak	<b>I. PENGHORMATAN</b> <i>(tidak ada gangguan dalam pelaksanaan hak)</i>	<b>II. PERLINDUNGAN</b> <i>(mencegah pelanggaran oleh pihak ke tiga)</i>	<b>III. PEMENUHAN</b> <i>(penyediaan sumberdaya dan hasil-hasil kebijakan)</i>
<b>Sipil dan Politik</b>	Mengupayakan adanya hukum yang menjamin kebebasan pers dan berekspresi, hukum yang melindungi warga agar tidak terjadi penyiksaan, pembunuhan tanpa pengadilan, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, pengadilan yang tidak adil, pencabutan hak pilih	Mengupayakan tindakan untuk mencegah pelaku non-negara melakukan tekanan kepada pers (pendudukan kantor redaksi, sweeping buku, dll), pelanggaran seperti penyiksaan, pembunuhan tanpa pengadilan, penghilangan paksa, penculikan dan intimidasi	Melakukan investasi dalam bidang kehakiman, penjara, kepolisian dan satpol PP agar bisa melakukan peningkatan kapasitas, menjamin kesertaan warga dalam pemilihan umum yang luber dan jurdil, serta alokasi sumberdaya untuk kemampuan masyarakat untuk memahami
<b>Ekosob</b>			



# Apa Itu IHAM?

Sebuah parameter yang sengaja dikembangkan sebagai alat ukur berbasis HAM untuk menilai sejauh mana pemenuhan hak asasi manusia dilakukan/diupayakan oleh pemerintah di sebuah daerah pada waktu tertentu

Parameter yang digunakan merupakan turunan dari komentar umum (*general comment*) mengenai kovenan hak ekosob (yang telah diratifikasi menjadi UU No 11 Tahun 2005) dan kovenan hak sipol (yang telah diratifikasi menjadi UU No 12 Tahun 2005)



# Parameter Dalam IHAM

Mengukur pemenuhan 3 kewajiban negara yang bersifat generik (respect, protect, fullfil)

Mengukur indikator struktur, proses, capaian (outcome)



# Apa itu indikator HAM? Apa bedanya dengan data statistik umum?

*A human rights indicator is specific information on the state of an event, activity or an outcome that can be related to human rights norms and standards; that addresses and reflects the human rights concerns and principles; and that can be used to assess and monitor the promotion and protection of human rights*

Berbeda dengan data statistik umum, indikator langsung diturunkan dari kerangka normatif hak tertentu sehingga dapat langsung diterapkan pada hak terkait



# Model Dasar IHAM

Kewajiban Negara Indikator	Respect	Protect	Fullfil
Struktur			
Proses			
Outcome			



# Indikator Struktural

Indikator ini mencerminkan ratifikasi/adopsi instrumen-instrumen hukum dan keberadaan mekanisme institusional dasar yang dianggap perlu guna memfasilitasi perwujudan hak asasi manusia yang bersangkutan

Misalnya, indikator struktural dalam hak atas pangan akan termasuk informasi ttg status hukum dari hak tersebut dan keberadaan mekanisme institusional termasuk kerangka peraturan dan badan-badan yang diberikan mandat untuk menangani persoalan ketersediaan dan aksesibilitas terhadap pangan



Hal yang sama, dalam hal hak atas upaya pemulihan hukum, indikator struktural dapat termasuk informasi tentang ratifikasi terhadap instrumen-instrumen internasional yang relevan, pembentukan institusi-institusi yudisial yang diwajibkan, dan kerangka hukum lokal yang mendukung, peraturan yang dipandang perlu untuk melaksanakan hak tersebut



# Indikator Proses

Indikator ini mengaitkan instrumen kebijakan Negara dengan pencapaian (*milestones*) pembangunan yang diakumulasikan menjadi hasil (*outcomes*) yang dapat lebih berhubungan langsung dengan perwujudan hak asasi manusia. Indikator semacam ini tidak hanya menggambarkan gagasan tentang akuntabilitas, tetapi pada saat yang sama juga secara langsung mendukung monitoring pemenuhan secara bertahap dari hak atau proses perlindungan terhadap hak, sebagaimana halnya bagi perwujudan hak yang bersangkutan



Beda dengan indikator hasil (*outcome*), indikator proses lebih sensitif terhadap perubahan; yang oleh karenanya ketimbang indikator hasil (*outcome*) serial waktu, indikator-indikator ini lebih baik dalam menggambarkan perwujudan secara bertahap dari hak tersebut

Misalkan dalam hal indikator proses hak atas pangan yang masuk adalah berbagai instrumen kebijakan negara seperti indikator untuk sistem penyewaan tanah, reformasi agrarian, investasi irigasi publik, perluasan pertanian, subsidi terhadap input-input agrarian, indikator rejim perdagangan; populasi yang dicakup dalam sistem distribusi publik, subsidi pangan; dan indikator kapasitas negara untuk melakukan pekerjaan asistensi (*relief works*)



## Indikator Hasil (Outcome)

Indikator ini menggambarkan pencapaian, individual maupun kolektif, yang mencerminkan status perwujudan hak asasi manusia dalam konteks tertentu

Beberapa indikator hasil dalam hal hak atas pangan a.l. pembagian pengeluaran bulanan rumah tangga utk makanan, rata-rata asupan kalori orang-orang dibandingkan dengan norma-norma



Setidaknya ada 2 karakteristik penting dari indikator hasil

Pertama, indikator ini lebih berhubungan langsung dgn perwujudan hak yang bersangkutan

Ke dua, mungkin terdapat sejumlah proses yang berkontribusi pada pencapaian suatu hasil tunggal



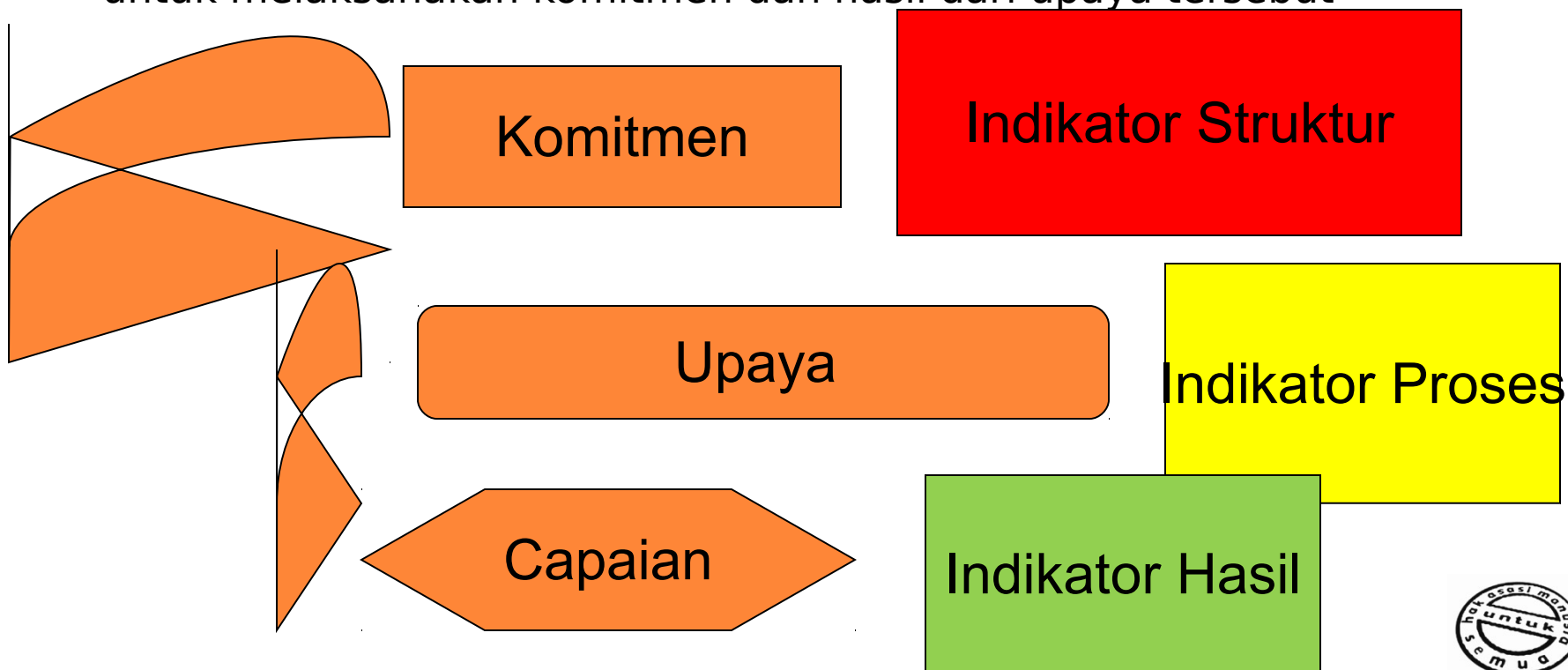
Perlu dibedakan antara indikator proses dan indikator hasil

Misalnya, jika tingkat pengharapan hidup (*life expectancy*) saat kelahiran digunakan sbg indikator hasil bagi perwujudan hak atas kesehatan, maka mungkin akan berguna utk melihat indikator proses tingkat kematian bayi, kesehatan publik, nutrisi, dan pendidikan sbg pencapaian (*milestones*) bhw kebutuhan akan pemenuhan dan perwujudan hak asasi manusia ini secara bertahap



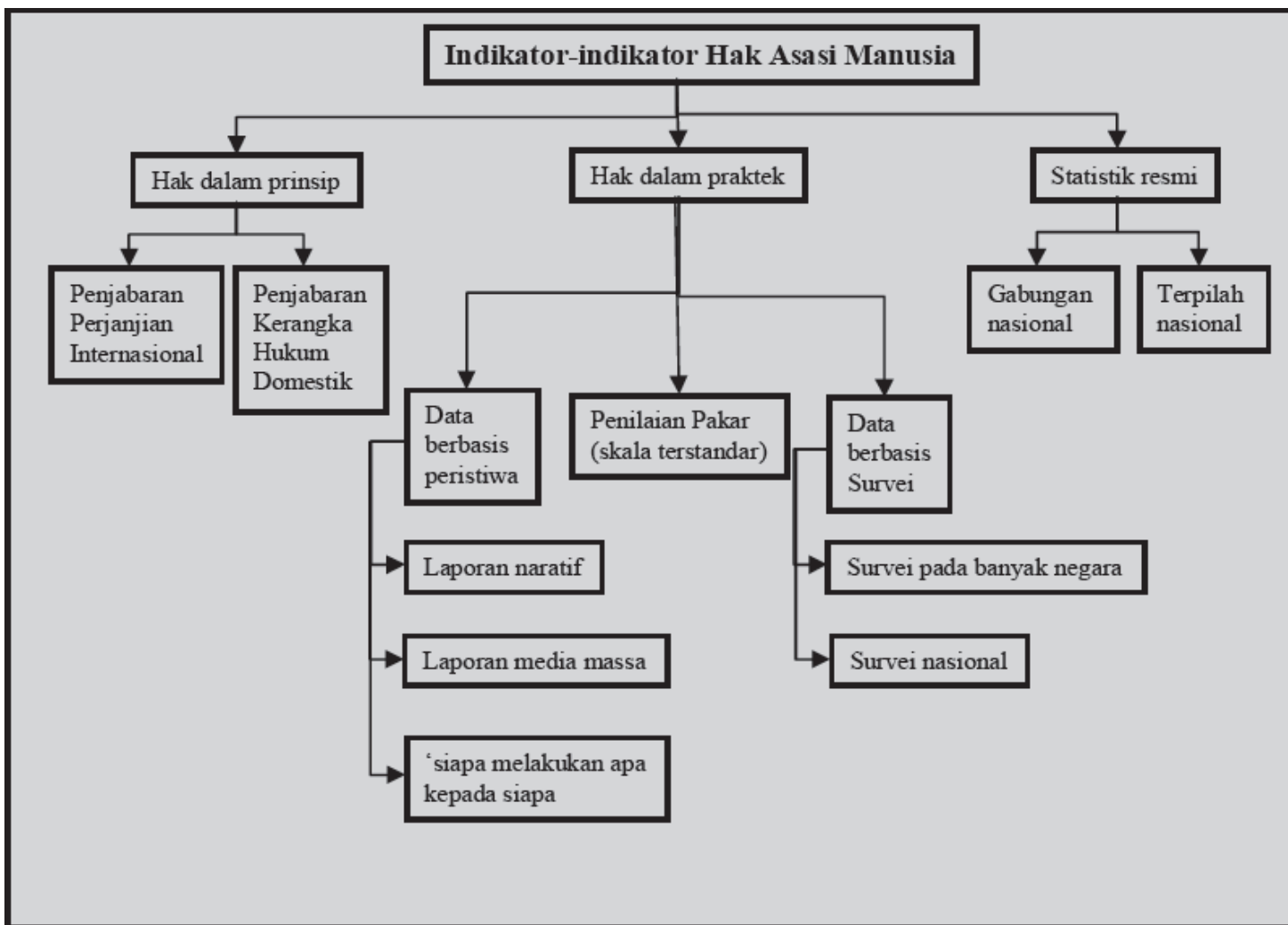
# Apa Urgensi indikator struktur, proses dan hasil untuk menilai Kondisi HAM/Demokrasi?

Tiga jenis indikator bermanfaat untuk menilai langkah-langkah yang diambil negara dalam melaksanakan kewajiban dari komitmen, upaya untuk melaksanakan komitmen dan hasil dari upaya tersebut





# Model Pengumpulan Data IHAM





Terima Kasih



**Komnas HAM**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

[www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

